DP3AP2KB
Prov NTB

RENCANA KERJA 2024

DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Singosari
No. 2 - Mataram

www.dp3ap2kb.ntbprov.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman Sampul		i
	Kata Pengantar		ii
	Daftar Isi		iii
BAB 1	**PENDAHULUAN**		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	3
	1.3	Maksud dan Tujuan	4
	1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	**EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU**		6
	Evaluasi pelaksanaan renja Tahun 2023		6
	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		24
	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		27
	Reviuw terhadap rencana awal RKPD		28
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**		29
BAB IV	**INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN**		39
BAB V	**PAGU INDIKATIF DAN PERKIRAAN MAJU**		43
BAB V	**PENUTUP**		55
	A	Kesimpulan	55
	B	Saran	55
Lampiran-lampiran			

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB telah selesai disusun dengan baik.

Renja DP3AP2KB Provinsi NTB mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Renja ini merupakan siklus pertama yaitu Perencanaan dari 3 (tiga) siklus manajemen berbasis kinerja.

Renja DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024 masih mengacu pada Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024-2026, digunakan sebagai acuan dalam implementasi program dan kegiatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Mataram, Oktober 2023

Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB

Dra. Nunung Triningsih, MM
Pembina TK.I
Nip: 19701419 198903 2 014

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Amanat UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah dapat menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan dimulai dengan perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek (tahunan), dan setiap daerah dapat menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan juga setiap OPD mewajibkan membuat Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman pada Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah (PD) dan mengacu pada Rencana Kerja Daerah (RPD).

Tujuan yang tercantutm pada RPD tahun 2024-2026 yaitu:

1. Tujuan 1 yaitu terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju ntb sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional bali dan nusa tenggara yang inklusif dan berkelanjutan.
2. ***Tujuan 2 yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal dan taqwa (kuat)***
3. Tujuan 3 yaitu terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan aSRI
4. ***Tujuan 4 yaitu Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mand***iri
5. ***Tujuan 5 yaitu Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan dae***rah
6. ***Tujuan 6 yaitu Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)***
7. Tujuan 7 yaitu terwujudnya peningkatan daya saing daerah

Dari 7 tujuan yang terkandung pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 terdapat 4 tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yaitu tujuan 2, 4, 5, dan 6 bertitik beratkan pada peningkatan kualitas manusia dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Tujuan 2 yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal dan taqwa (kuat) dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa

Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT), dengan ukuran indeks pembangunan manusia, sehingga beririsan dengan indeks pembangunan dan pemberdayaan gender dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan ukuran mCPR, TFR dan rata-rata usia kawin pertama perempuan.

Tujuan 4 yaitu terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri dengan sasaran strategis Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan menitiberatkan pada peningkatan pendapatan perkapita sehingga dikaitkan dengan urusan pemberdayaan perempuan yaitu meningkatkan pemberdayaan perempuan. Pemebrdayaan perempuan diterjemahkan kedalam sumbanganan pendapatan perempuan.

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik, upaya ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan PUG harus terefleksi dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan yang lainnya sudah responsif gender. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukkan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. PPRG bukan sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat

analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Secara spesifik PPRG merupakan bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia.dimana pengelolaan anggara menggunakan analisis gender pada input, output dan outcome pada perencanaan dan penganggaran serta mengintegrasikan aspek keadilan.

Tujuan 5 yaitu Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah dengan sasaran strategis adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundangundangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik dengan ukuran nilai kinerja dinas P3AP2KB.

Tujuan 6 yaitu Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan sasaran strategis adalah Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah Provinsi NTB dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan ukuran indicator SDGs urusan sosial yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di samping itu urusan pengendalaian penduduk dan keluarga berencana.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB dibentuk sesuai Perda Provinsi NTB Nomor 44 Tahun 2017 pengganti Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan ditunjuk sebagai pembantu Gubernur dalam menyelanggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak penendalian penduduk dan Keluarga Berencana, sesuai dengan Rencana Strategi DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024 yang memuat Program, kegiatan, Sub kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.

1.2.Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, tatacara, penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB yaitu:

1. **Maksud**

   Maksudnya adalah untuk memberi arah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan dalam berbagai program dengan fokus dan responsive terhadap kebutuhan mayarakat.

2. **Tujuan**

   Tujuannya adalah sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB.

1.4.Sistematika Penulisan Renja OPD

Sistematika penulisan Rencana Kerja DP3AP2KB Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II : Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah, Review terhadap rangcangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisikan tujuan dan sasaran tahun 2024

Baba IV: Indikator kinerja

Bersisikan indicator kinerja tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan

Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada Bab ini menguraikan sumber dana untuk program dan kegiatan yaitu melalui dana APBD Provinsi NTB tahun 2024

Bab VI : Penutup

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi adalah kegiatan untuk membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Evaluasi merupakan alat penting untuk membantu pengambilan keputusan sejak tingkat perumusan kebijakan maupun pada tingkat pelaksanaan program dan kegiatan dan dapat dilakukan setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kerja Tahun 2023

A. Rencana Kinerta Tahunan (RKT) Tahun 2023

Rencana kerja tahun 2023 sebagai patokan dalam mengevaluasi kinerja berdasarkan capaian kinerja 1 tahun sebelumnya. Rencana kerja diukur melalui rencana kinerja tahunan (RKT) tahun 2024 seperti pada table 2.1. berikut.

Tabel 2.1
Rencana kinerja tahunan (RKT) tahun 2023

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis	Satuan	2023
1	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Indeks Pemberdayaan Gender	Point	**61,40**
		Terwujudnya kesetaraan gender	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	%	**20,47**
		Terwujudnya Provinsi Layak Anak	Persentase Kab/Kota Layak Anak	%	**100**
2	Terkendalinya laju peetumbuhan penduduk		Laju pertumbuhan penduduk	%	**0,95**
		Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan	Rata-rata usia kawin pertama perempuan	Tahun	**20,49**

RKT

Untuk mencapai kinerja tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan di perlukan dukungan dana yang cukup. Dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis di pilih 1 (satu) menjadi indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase Kab/Kota layak anak. Rencana penggunaan dana yang tertuang pada Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2023 seperti pada table 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Program dan kegiatan pada Renstra berdasarkan Sasaran Strategis dan Unit KerjaTahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	JUMLAH DANA (Rp)	BIDANG PELAKSANA
1	Terwujudnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Program PUG dan pemberdayaan perempuan	2.440.478.338	Bidang KHP
		Program peningkatan kualitas keluarga	525.129.408	Bidang KHP
		Program pengelolaan sistem data gender dan anak	90.540.439	Bidang KHP
		Program perlindungan perempuan	734.965.548	Bidang PP
		Program perlindungan perempuan	376.271.948	UPTD PPA
2	Terwujudnya provinsi layak anak	Program pemenuhan hak anak (PHA)	618.134.168	Bidang PHA
		Program perlindungan khusus anak	817.988.306	Bidang PKA
		Program perlindungan khusus anak	60.360.293	UPTD PPA
3	Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Program pembinaan keluarga berencana	380.755.482	Bidang PPKB
		Program pengendalian penduduk	439.459.838	Bidang PPKB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	393.171.422	Bidang PPKB
	Pendukung 3 buah sasaran strategis	Program penunjang urusan pemerintah daerah	10.203.041.330	Sekretariat
		Program penunjang urusan pemerintah daerah	398.058.473	UPTD PPA
	Total kebutuhan dana		**17.478.354.997**	**DP3AP2KB**

Prog/Keg

Berdasarkan jumlah dana pada table 2.2 menunjukan bahwa ada selisih kurang dari anggaran yang diberikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.097.090.606 (Delapan milyar Sembilan puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu enam ratus enam rupiah) seperti pada table 2.3 berikut.

Tabel 2.3

RENCANA PROGAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN pada DPA/DPPA TAHUN 2023

Kode Rekening	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2 08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**9.381.264.391**
2 08 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP**	**Kategori**	**BB**	**7.990.949.191**
2 08 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**Dokumen**	**7**	**64.312.900**
2 08 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	37.063.000
2 08 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.855.900
2 08 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.932.700
2 08 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.585.000
2 08 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.464.500
2 08 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	4.710.000
2 08 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	4.701.800
2 08 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang**	**Orang**	**65**	**7.066.080.891**

2 08 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	65	7.038.145.891
2 08 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	21.350.000
2 08 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.585.000
2 08 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**12.695.000**
2 08 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	12.695.000
2 08 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**92.366.200**
2 08 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	8.441.500
2 08 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.747.000
2 08 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12.700.000
2 08 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	12.600.000
2 08 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	41.877.700
2 08 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**63.714.200**
2 08 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.966.000
2 08 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	77.080.200
2 08 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	19.800.000
2 08 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	364.868.000
2 08 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**291.780.000**

	Daerah				
2 08 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	30	256.200.000
2 08 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	13.800.000
2 08 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	21.780.000
2 08 02	**PROGRAM PENGARU-SUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase PD yang menerapkan PPRG**	**%**	**100**	**589.785.000**
2 08 02 1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	**%**	**45**	**89.785.000**
2 08 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	52.785.000
2 08 02 1.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	47	37.000.000
2 08 02 1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**Proporsi kader perempuan di partai politik**	**Persen**	**39.2**	**500.000.000**
2 08 02 1.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	500.000.000
2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan**	**Persen**	**3**	**178.932.400**
2 08 03 1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan**	**Kasus**	**237**	**69.252.000**
2 08 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,	Dokumen	1	69.252.000

	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			
2 08 03 1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas**	**Orang**	**30**	**109.680.400**
2 08 03 1.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	20	57.108.300
2 08 03 1.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	40	52.572.100
2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan**	**Layanan**	**50**	**85.033.000**
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagPerempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	60	85.033.000
2 08 04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Index Ketahanan Keluarga**	**Persen**	**5,5**	**73.000.000**
2 08 04 1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Provinsi.**	**Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga**	**Desa**	**5**	**73.000.000**
2 08 04 1.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	40	25.000.000
2 08 04 1.02 03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	48.000.000

2 08 05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Dokumen Gender**	**Dokumen**	**1**	**18.000.000**
2 08 05 1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**Dokumen Gender**	**Dokumen**	**1**	**18.000.000**
2 08 05 1.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dokumen Gender	Dokumen	1	18.000.000
2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase PD yang menerapkan Pengarusutamaan Hak Anak**	**Persen**	**42**	**360.645.500**
2 08 06 1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak**	**Organisasi**	**50**	**360.645.500**
2 08 06 1.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Organisasi	50	192.845.000
2 08 06 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	10	167.800.500
2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**Persen**	**100**	**169.952.300**
2 08 07 1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi**	**Dokumen**	**1**	**94.725.000**
2 08 07 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	94.725.000
2 08 07 1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota**	**Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Anak yang mendapat peningkatan kapasitas**	**Orang**	**36**	**75.227.300**
2 08 07 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan	Dokumen	1	75.227.300

	Kewenangan Provinsi	Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus**	**Dokumen**	**10**	**169.471.000**
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Layanan	80	169.471.000
2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**1.525.873.500**
2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Pendewasaan Usia Perkawinan**	**Tahun**	**21**	**145.409.200**
2 14 02 1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Pesentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk**	**Persen**	**80**	**99.144.200**
2 14 02 1.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	37.499.200
2 14 02 1.01 03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	1	61.645.000
2 14 02 1.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan**	**Dokumen**	**1**	**46.265.000**
2 14 02 1.02 04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Dokumen	1	46.265.000
2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)**	**Persen**	**0**	**37.376.000**
14 03 1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan**	**Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dlm pembinaan kesertaan ber KB**	**Organisasi**	**10**	**37.376.000**

	dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
2 14 03 1.02 02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	10	37.376.000
2 14 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre**	**Persen**	**100**	**1.343.088.300**
2 14 04 1.01	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase keluarga anak usia 0-5 tahun yang menggunakan KKA dan KMS**	**Persen**	**80**	**43.088.300**
2 14 04 1.01 08	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Organisasi	10	43.088.300
2 14 04 1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB**	**Persen**	**80**	**1.300.000.000**
2 14 04 1.02 04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Dokumen	10	1.300.000.000

Data

B. Capaian Kinerja Tahun 2023

Kinerja adalah hasil dari program/kegiatan yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Capaian kinerja tahun 2023 seperti pada table 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Capaian kinerja tahun 2023

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% REALISASI KINERJA
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungana anak	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Point	61,40	NA	NA
	Terwujudnya kesetaraan gender	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan (PPP)	%	20,47	NA	NA
	Terwujudnya provinsi layak anak	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	%	100	100	100
2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,95	0,95	100
	Terwujudnya PUP	Rata-rata usia kawin pertama perempuan	Tahun	20,49	NA	NA

Data

Berdasarkan capaian kinerja atau realisasi kinerja tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian target kinerja tercapai dan sebagian belum tercapai. Kinerja yang sudah tercapai yaitu Kabupaten/Kota layak anak yang disebabkan karena adanya komitmen bersama antara pemangku kebijakan di level provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memenuhi kebutuhan pemenuhan hak-hak anak. Disamping itu laju pertumbuhan penduduk disebabkan karena adanya dukungan dari pasangan usia subur yang ikut serta dalam mendukung program keluarga berencana nasional dengan ukuran tingginya akseptor KB dan terkendalinya perkawinan di bawah usia ideal disamping itu terkendalinya Total Fertiliy Rate.

Kemudian target kinerja yang belum tercapai (data belum tersedia di BPS) yaitu pemberdayaan perempuan dengan ukuran indeks pemberdayaan gender. Penyebab kegagalan yaitu dari 3 komponen indicator terdapat 1 indikator yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB yaitu partisipasi perempuan di lembaga legislatif.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Program dan kegiatan DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2023

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2 08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					**9.381.264.391**
2 08 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP**	**Kategori**	**BB**	**NA**	**7.990.949.191**
2 08 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**Dokumen**	**7**	**7**	**64.312.900**
2 08 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	37.063.000
2 08 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.855.900
2 08 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.932.700
2 08 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2.585.000
2 08 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3.464.500
2 08 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	4.710.000
2 08 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	4.701.800

2 08 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang**	**Orang**	**65**	**48**	**7.066.080.891**
2 08 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	65	48	7.038.145.891
2 08 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	21.350.000
2 08 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	6.585.000
2 08 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**1**	**12.695.000**
2 08 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	12.695.000
2 08 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**1**	**92.366.200**
2 08 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	8.441.500
2 08 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	16.747.000
2 08 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	12.700.000
2 08 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	12.600.000
2 08 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	41.877.700
2 08 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**1**	**63.714.200**
2 08 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1.966.000
2 08 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	77.080.200
2 08 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	19.800.000

2 08 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	364.868.000
2 08 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**1**	**291.780.000**
2 08 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	30	30	256.200.000
2 08 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	13.800.000
2 08 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	21.780.000
2 08 02	**PROGRAM PENGARU-SUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase PD yang menerapkan PPRG**	**%**	**100**	**100**	**589.785.000**
2 08 02 1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	**%**	**45**	**45**	**89.785.000**
2 08 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	52.785.000
2 08 02 1.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	47	47	37.000.000
2 08 02 1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**Proporsi kader perempuan di partai politik**	**Persen**	**39.2**	**39.2**	**500.000.000**
2 08 02 1.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	500.000.000

2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan**	**Persen**	**3**	**3**	**178.932.400**
2 08 03 1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan**	**Kasus**	**237**	**237**	**69.252.000**
2 08 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	69.252.000
2 08 03 1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas**	**Orang**	**30**	**30**	**109.680.400**
2 08 03 1.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	20	20	57.108.300
2 08 03 1.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	40	40	52.572.100
2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan**	**Layanan**	**50**	40	**85.033.000**
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagPerempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	60	**12**	85.033.000
2 08 04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Index Ketahanan Keluarga**	**Persen**	**5,5**	60	**73.000.000**
2 08 04 1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan**	**Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga**	**Desa**	**5**	**5,5**	**73.000.000**

	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					
2 08 04 1.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	40	40	25.000.000
2 08 04 1.02 03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	48.000.000
2 08 05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Dokumen Gender**	**Dokumen**	**1**	**1**	**18.000.000**
2 08 05 1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**Dokumen Gender**	**Dokumen**	**1**	**1**	**18.000.000**
2 08 05 1.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dokumen Gender	Dokumen	1	1	18.000.000
2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase PD yang menerapkan Pengarusutamaan Hak Anak**	**Persen**	**42**	**42**	**360.645.500**
2 08 06 1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak**	**Organisasi**	**50**	**50**	**360.645.500**
2 08 06 1.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	50	50	192.845.000
2 08 06 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	10	10	167.800.500
2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**Persen**	**100**	**100**	**169.952.300**

2 08 07 1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi**	**Dokumen**	**1**	**1**	**94.725.000**
2 08 07 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	94.725.000
2 08 07 1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Anak yang mendapat peningkatan kapasitas**	**Orang**	**36**	**36**	**75.227.300**
2 08 07 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	75.227.300
2.08.07.1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus**	**Dokumen**	**10**	**10**	**169.471.000**
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Layanan	80	80	169.471.000
2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					**1.525.873.500**
2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Pendewasaan Usia Perkawinan**	**Tahun**	**21**	**21**	**145.409.200**
2 14 02 1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas**	**Pesentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk**	**Persen**	**80**	**57**	**99.144.200**

	Penduduk					
2 14 02 1.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	37.499.200
2 14 02 1.01 03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	1	1	61.645.000
2 14 02 1.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**46.265.000**
2 14 02 1.02 04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Dokumen	1	1	46.265.000
2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)**	**Persen**	**0**	**0**	**37.376.000**
14 03 1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dlm pembinaan kesertaan ber KB**	**Organisasi**	**10**	**10**	**37.376.000**
2 14 03 1.02 02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	10	10	37.376.000
2 14 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre**	**Persen**	**100**	**100**	**1.343.088.300**
2 14 04 1.01	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase keluarga anak usia 0-5 tahun yang menggunakan KKA dan KMS**	**Persen**	**80**	**80**	**43.088.300**
2 14 04 1.01 08	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Organisasi	10	10	43.088.300
2 14 04 1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi**	**Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB**	**Persen**	**80**	**80**	**1.300.000.000**

	KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
2 14 04 1.02 04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Dokumen	10	10	1.300.000.000

Data

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada kinerja pelayanan tahun 2023, tetapi secara keseluruhan belum dapat di ambil kesimpulan bahwa kinerja sudah berhasil atau tidak dan kondisi saat ini kinerja pelayanan yang diambil yaitu kinerja Tahun 2023, mengingat sebagai data kinerja belum tersedia di BPS. Kinerja pelayanan Tahun 2023 berdasarkan Renstra Tahun 2019-2023. Analisis kinerja DP3AP2KB Provinsi tahun 2023 disesuaikan dengan Renstra Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
    a. Indeks pemberdayaan gender
    b. Partisipasi perempuan dalam pembangunan
    c. Provinsi layak anak
2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
    a. Laju pertumbuhan penduduk
    b. Rata-rata usia kawin pertama perempuan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Fungsi DP3AP2KB yaitu melaksanakan tugas eksekusi dari 2 urusan pemerintah yaitu ***pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*** dengan sub urusan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ***sedangkan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana*** dengan sub urusan yaitu pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Isu yang dikembangkan yaitu rendanya kualitas hidup perempuan, masih terjadi kasus kekerasan pada perempuan dan anak serta tingginya kasus perkawinan usia muda. Untuk mendukung pencapaian terget dari setiap indikator kinerja, diperlukan asupan dana Rp.17.478.354.997 sedangkan dana yang tersedia pada DPA/DPPA sebesar 10.907.137.891. atau 62,40%.

Dari dana yang tersedia pada DPA/DPPA kemungkinan sebagian kinerja tidak tercapai misalnya isu rendanya kualitas hidup perempuan dengan partisipasi ekonomi perempuan. Dari isu tersebut dana dibutuhkan, sedangkan dana yang dibagikan jauh dibawah target seperti pada table 2.2 dan 2.3 di atas.

2.4. Review terhadap Rencana Awal RKPD

Pada sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah,

1. Indeks pemberdayaan gender

   Dukungan pelaksananaan program baik dari DP3AP2KB, BKKBN dan mitra kerja berjalan dengan baik, walau sampai dengan saat ini data kinerja belum tersedia dari BPS NTB

2. Partisipasi perempuan dalam pembangunan

   Dukungan pelaksananaan program baik dari DP3AP2KB, BKKBN dan mitra kerja berjalan dengan baik, walau sampai dengan saat ini data kinerja belum tersedia dari BPS NTB

3. Kabupaten/Kota Layak anak

   Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja kabupaten/Kota layak anak dapat di laksanakan dengan baik sehingga target kinerja berhasil yaitu realisasi mencapaia target yaitu 100% Kabupaten/Kota layak anak dan sudah mendapat predikat dari Kementerian PPPA RI.

4. Laju pertumbuhan penduduk

   Realisasi kinerja berada pada kategori berhasil karena capaian kinerja mencapai target yaitu 100%

5. Rata-rata usia kawin pertama perempuan

   Dukungan pelaksananaan program baik dari DP3AP2KB, BKKBN dan mitra kerja berjalan dengan baik, walau sampai dengan saat ini data kinerja belum tersedia dari BPS NTB

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pemerintah Provinsi tentang penggabungan dua urusan pemerintah yaitu pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana menjadi satu perangkat daerah yaitu dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana Provinsi NTB. Penetapan kebijakan tersebut melahirkan tugas dan fungsi perangkat daerah dan dijabarkan kedalam program dan kegiatan yang dapat menunjang kebijakan Provinsi NTB dan sekaligus menunjang kebijakan nasional.

1. Arah kebijakan nasional tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merujuk pada kementerian PPPA RI adalah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
   b. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik
   c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)
   d. Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO),
   e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
   f. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal
   g. Pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan konflik
   h. Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan
   i. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
   j. Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
   k. Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

2. Arah kebijakan tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana merujuk pada BKKBN Pusat adalah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional

b. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
c. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah
d. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia
e. Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana
f. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah
g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu
h. Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKB

Berikut ini arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan tugas dan fungsi DP3AP2KB Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja dan lansia
2. Meningkatkan layanan posyandu yang unggul dan berkualitas
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pencegahan dan penang-gulangan penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat
5. Menguatkan perencanaan dan penganggaraan responsif gender dan pemenuhan hak anak
6. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan ketahanan keluarga
7. Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan penguatan lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum pada RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026, selanjutnya menjabarkan pada Perangkat Daerah yang mencerminkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB yaitu seperti table 3.1 berikut.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	**Tujuan 1:** Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
2	**Tujuan 2:** Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Anak	Cakupan Kab/Kota yang mendapat penghargaan KLA tingkat Madya dan Nindya
	Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Angka Perkawinan Usia Anak
3	**Tujuan 3:** Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Sasaran Strategis 3: Tewujudnya Peningkatan Kepesertaan Ber-KB	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)
	Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan

Tujuan dan sasaran

C. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2.08.01	**Program penunjang urusan pemerintah daerah**
2.08.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***
2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.08.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
2.08.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.08.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.08.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.08.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.08.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.08.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.08.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.08.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***
2.08.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.08.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.08.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.08.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.08.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.08.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.08.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
2.08.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.08.01.1.07.05	Pengadaan Mebel
2.08.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.08.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
2.08.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.08.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.08.01	**Program penunjang urusan pemerintah daerah (UPTD-PPA)**
2.08.01.1.06	***Administrasi umum Perangkat Daerah***
2.08.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2.08.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.08.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga
2.08.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.08.01.1.07	***Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah***
2.08.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapanga
2.08.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
2.08.01.1.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainny
2.08.01.1.08	***Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah***
2.08.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sda dan listri
2.08.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
2.08.01.1.09	***Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***
2.08.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas
2.08.01.09.05	Pemeliharaan mebel
2.08.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2.08.02	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
2.08.02.1.01	***Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi***
2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.02	***Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi***
2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pember-dayaan Perempuan Kewenangan Provinsi***
2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

2.08.03	**Program perlindungan perempuan (Bidang PP)**
2.08.03.1.01	***Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota***
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
2.08.03.1.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi***
2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
2.08.03	**Program Perlindungan Perempuan (UPTD PPA)**
2.08.03.1.02	***Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota***
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.
2.08.04	**Program peningkatan kualitas keluarga**
2.08.04.1.01	***Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi***
2.08.04.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kab/ Kota
2.08.04.1.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
2.08.04.1.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2.08.05	**Program pengelolaan sistem data gender dan anak**
2.08.05.1.01	***Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi***
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
2.08.06	**Program pemenuhan hak anak (Bidang PHA)**
2.08.06.1.01	***Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi***
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2.08.07	**Program perlindungan khusus anak (Bidang PKA)**
2.08.07.1.01	***Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota***
2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
2.08.07.1.03	***Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota***

2.08.07.1.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi .
2.08.07	**Program perlindungan khusus anak (UPTD PPA)**
2.08.07.1.02	***Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi***
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi
2.14.02	**Program Pengendalian Penduduk**
2.14.02.1.01	***Pemaduan dan Sinkronisasi Kebi-jakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk***
2.14.02.1.01.07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas pengelola kelompok kegiatan di masyarakat
2.14.02.1.01.09	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
2.14.03	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**
2.14.03.1.01	***Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB***
2.14.03.01.01	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal
2.14.04	**Program pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga sejahtera**
2.14.04.1.02	***Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Ke Masyarakatan Tingkat Daerah Prov dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kese-jahteraan Keluarga***
2.14.04.1.02.05	Fasilitasi Penge-mbangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

A. Indikator kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui perkembangan hasil yang telah dicapai. Hasil yang telah dicapai berupa ouput dan intermediate Outcome, Outcome dan Impact dari pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024 seperti pada table berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	Indeks pemabangunan gender (IPG)	Point	90,65
a	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	54,39
b	Partisipasi perempuan dalam pembangunan	%	33,15
2	Cakupan Kab/ Kota yang mendapat penghargaan KLA tingkat Madya dan Nindya	%	60,00
c	Angka Perkawinan Usia Anak	%	16,21
3	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,46
d	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	%	75,00
e	Rata-rata usia kawin pertama perempuan	Tahun	20,53

Tabel 4.1

Tabel 4.2
Rencana Kerja berdasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)
DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci Output/ Outcome	Satuan	Target 2024
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	100
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	10.000	0,15
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan,	100.000	0,12

	termasuk TPPO (per 100.000 penduduk		
4	Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total	%	2,35
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	75,00
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,50

Tabel 4.2

Tabel 4.3
Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Target Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target
1	**Nilai Sakip DP3AP2KB NTB**	**Point**	**BB**
a	***Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun***	***Dok***	***7***
a.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	6
a.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1
a.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1
a.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1
a.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dok	1
a.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyu-sunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Lap	3
a.7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	4
b	***Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Lap***	***1***
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	72
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyu-sunan Laporan Keuangan Akhir	Lap	1
c	***Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah***	***Paket***	***100%***
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Paket	1 Pkt
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2

	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
d	***Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah***	***%***	***100***
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	1
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	4
e	***Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah***	***Paket***	***1***
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3
f	***Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	***%***	***100***
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	1
	Jumlah Laporan Penye-diaan Jasa Komu-nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Per-alatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	1
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	12
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
g	**Cakupan ketersediaan bahan/data LKjIP**	**%**	**100**
	Jumlah administrasi umum Perangkat daerah yang disediakan	***Paket***	***1***
	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediaka	Paket	1
	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1

h	***Jumlah pengadaan barangmilik daerah penunjangurusan Pemerintah***	***Paket***	***0***
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediaka	Unit	1
	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediaka	Unit	1
	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	Unit	0
i	***Jumlah penyediaan jasa penunjangurusan pemerintah daerah***	***Paket***	***9***
	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sda dan listri	Paket	1
	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Paket	1
j	***Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	***Paket***	***0***
	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajakny	Unit	5
	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitas	Unit	1
2	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**%**	**5**
a	***Jumlah OPD yang mendapat pendampingan ARG***	***OPD***	***46***
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	1
	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Org	
	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota		
b	***Jumlah lembaga penyedia layanan yang dibina***	***Lembg***	***18***
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembg	18
	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Org	150
3	**Cakupan perlindungan terhadap perempuan**	**Org**	**125**
a	***Jumlah Peserta Sosialisasi***	***Org***	***35***
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pela-ksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pence-gahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan provinsi	Dok	1
b	***Cakupan penguatan SDM lembaga penyedia layanan perilndungan perempuan,***	***Org***	***30***

	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Org	60
3.1	**Cakupan perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif**	**%**	**100**
a	***Jumlah penerimaan pengaduan perempuan korban kekerasan dan TPPO kewenangan provinsi.***	***Org***	***70***
	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.-(Layanan)	Layanan	60
4	**Persentase perempuan rentan yang bekerja**	**%**	**85**
a	***Jumlah perempuan rentan yang dilatih wira usaha***	***Org***	***250***
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kab./Kota	PD	46
	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dok	1
	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Laporan	1
5	**Cakupan data gender dan anak yang mendukung indikator kinerja**	**%**	**95**
a	***Jumlah data gender dan anak kewenangan provinsi***	***Dok***	***1***
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dok	1
6	**Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan / pembinaan KLA**	**Kab**	**10**
a	***Jumlah Lembaga yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak***	***lembg***	***250***
	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Orgssi	250
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dok	1
7	**Cakupan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif**	**%**	**50**
a	***Jumlah para pihak yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan anak.***	***Org***	***354***
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provins	Dok	1
b	***Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan kegiatan penguatan dan pengembangan layanan***	***Lembaga***	***250***

	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi .	Dok	1
8	**Cakupan anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif**	**%**	**100**
a	***Jumlah penerimaan pengaduan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi.***	***Org***	***85***
	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Layanan	80
9	**Persentase perangkat daerah/ Badan /Lembaga dalam pemanfaatan GDPK**	**%**	**100**
a	***Jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan GDPK***	***Dok***	***1***
	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelak-sanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dok	1
	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Dok	1
10	**Persentase Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB**	**%**	**100**
a	***Jumlah dokumen hasil pengembangan strategi operasional promosi dan konseling kespro sesuai kearifan budaya lokal***	***Dok***	***1***
	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Lap	1
11	**Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling Remaja).**	**%**	**100**
a	***Jumlah dokumen fasilitasi pengembangan program ketahanan keluarga di kampong keluarga berkualitas (KB)***	***Dok***	***1***
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Kab/Kota	10

Kinerja

B. Kelompok sasaran berdasarkan Program Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	PROGRAM	KELOMPOK SASARAN
1	Sekretariat	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Bidang dan subbid BP3AKB
2	Bidang KHP	Program PUG dan pemberdayaan perempuan	Kelompok Masyarakat, LSM, SKPD, Stakeholders terkait
		Program peningkatan kualitas keluarga	
		Program pengelolaan sistem data gender dan anak	

3	Bidang PP	Program perlindungan perempuan	Perempuan LSM, Dinas/Instansi Terkait, Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan Korban kekerasan
4	Bidang PHA	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Anak (Perempuan dan laki) usia dibawah 18 tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan ibunya
5	Bidang PKA	Program perlindungan khusus anak	Anak (Perempuan dan laki) usia dibawah 18 tahun
6	Bidang PPKB	Program pengendalian penduduk	Remaja, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Dinas/Instansi Terkait, LSM
		Program pembinaan keluarga berencana	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Remaja, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Todat, mitra kerja Dinas/Instansi Terkait, NGO dan LSM
7	UPTD PPA	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Subbag TU dan Seksi pada UPTD PPA
		Program perlindungan perempuan	Perempuan usia 18 tahun keatas yang mengalami kekerasan
		Program perlindungan khusus anak	Anak (Perempuan dan laki) usia dibawah 18 tahun keatas yang mengalami kekerasan

Data

BAB V
PAGU INDIKATIF DAN PRAKIRAAN MAJU

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis DP3AP2KB Provinsi NTB tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Indikasi kebutuhan pendanaan DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024

1. Kebutuhan dana berdasarkan Program pada Unit Kerja Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	PROGRAM	JUMLAH DANA DIBUTUHKAN (Rp)
1	Sekretariat	Program penunjang urusan pemerintah daerah	8.858.843.761
2	Bidang KHP	Program PUG dan pemberdayaan perempuan	410.000.000
		Program peningkatan kualitas keluarga	145.000.000
		Program pengelolaan sistem data gender dan anak	28.250.150
3	Bidang PP	Program perlindungan perempuan	102.000.000
4	Bidang PHA	Program pemenuhan hak anak (PHA)	500.000.000
5	Bidang PKA	Program perlindungan khusus anak	680.000.000
6	Bidang PPKB	Program pengendalian penduduk	206.734.388
		Program pembinaan keluarga berencana	150.000.000
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	150.000.000
7	UPTD PPA	Program penunjang urusan pemerintah daerah	615.500.000
		Program perlindungan perempuan	250.000.000
		Program perlindungan khusus anak	300.000.000
	Total kebutuhan dana		**12.396.328.299**

Data

2. Kebutuhan dana berdasarkan sasaran sasaran strategis Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	JUMLAH DANA (Rp)	BIDANG PELAKSANA
1	Terwujudnya kesetaraan gender	Program PUG dan pemberdayaan perempuan	410.000.000	Bidang KHP
		Program peningkatan kualitas keluarga	145.000.000	Bidang KHP
		Program pengelolaan sistem data gender dan anak	28.250.150	Bidang KHP
		Program perlindungan perempuan	102.000.000	Bidang PP
		Program perlindungan perempuan	250.000.000	UPTD PPA
2	Terwujudnya pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak	Program pemenuhan hak anak (PHA)	500.000.000	Bidang PHA
		Program perlindungan khusus anak	680.000.000	Bidang PKA
		Program perlindungan khusus anak	300.000.000	UPTD PPA
3	Tewujudnya peningkatan kepesertaan ber-KB	Program pembinaan keluarga berencana	150.000.000	Bidang PPKB
4	Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Program pengendalian penduduk	206.734.388	Bidang PPKB
		Program Pember-dayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	150.000.000	Bidang PPKB
	Total kebutuhan dana		**3.537.484.538**	**DP3AP2KB**

B. Pagu Dana Prakiraan Maju DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	PROGRAM	JUMLAH DANA DIBUTUHKAN (Rp)
1	Sekretariat	Program penunjang urusan pemerintah daerah	8.407.491.651
2	Bidang KHP	Program PUG dan pemberdayaan perempuan	460.000.000
		Program peningkatan kualitas keluarga	150.000.000
		Program pengelolaan sistem data gender dan anak	29.427.153
3	Bidang PP	Program perlindungan perempuan	100.000.000

4	Bidang PHA	Program pemenuhan hak anak (PHA)	520.000.000
5	Bidang PKA	Program perlindungan khusus anak	700.000.000
6	Bidang PPKB	Program pengendalian penduduk	210.869.076
		Program pembinaan keluarga berencana	150.000.000
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	150.000.000
7	UPTD PPA	Program penunjang urusan pemerintah daerah	654.700.000
		Program perlindungan perempuan	260.000.000
		Program perlindungan khusus anak	350.000.000
	Total kebutuhan dana		**12.912.487.870**

Data

Lampiran 1.4

Lampiran 1.4

Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Indikatif dan Prakiraan Maju Dinas P3AP2KB
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Target	Rupiah	Sumber Dana	Lokasi Keg	Target	Rupiah
2.08.01	**Program penunjang urusan pemerintah daerah**	**Point**	**BB**	**8.858.843.761**	PAD	**Mataram**	**A**	**8.407.491.651**
2.08.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Dok***	***7***	***157.853.890***	PAD	Mataram	***7***	***149.674.591***
2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	6	81.984.112	PAD	Mataram	6	77.725.667
2.08.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dok	1	4.195.022	PAD	Mataram	1	3.997.123
2.08.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	18.277.206	PAD	Mataram	1	17.327.845
2.08.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dok	1	4.995.739	PAD	Mataram	1	4.736.249
2.08.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dok	1	4.224.254	PAD	Mataram	1	4.004.836
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	3	2.715.674	PAD	Mataram	3	2.574.615
2.08.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	4	41.461.883	PAD	Mataram	4	39.308.256
2.08.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Lap***	***1***	***7.126.998.647***	PAD	Mataram	***1***	***6.756.805.794***
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	72	7.107.196.812	DAU	Mataram	72	6.738.032.512
2.08.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1	15.250.875	PAD	Mataram	1	14.458.709
2.08.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	4.550.960	PAD	Mataram	1	4.314.573

2.08.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Paket***	***100%***	***18.864.500***	PAD	Mataram	***100%***	***18.664.500***
2.08.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Paket	1 Pkt	2.900.000	PAD	Mataram	1 Pkt	2.700.000
2.08.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2.000.000	PAD	Mataram	2	2.000.000
2.08.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	13.964.500	PAD	Mataram	1	13.964.500
2.08.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***277.718.192***	PAD	Mataram	***100***	***263.812.287***
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	7.032.781	PAD	Mataram	1	6.667.482
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	26.099.813	PAD	Mataram	1	24.744.128
2.08.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	10.000.000	PAD	Mataram	1	10.000.000
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	42.269.363	PAD	Mataram	1	40.073.794
2.08.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dok	1	22.697.483	PAD	Mataram	1	21.518.523
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	4	169.618.752	PAD	Mataram	4	160.808.360
2.08.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Paket***	***1***	***286.199.753***	PAD	Mataram	***1***	***272.372.720***
2.08.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	229.393.606	PAD	Mataram	0	217.478.369
2.08.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Paket	1	20.000.000	PAD	Mataram	1	20.000.000
2.08.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	3	36.806.147	PAD	Mataram	3	34.894.351
2.08.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***584.300.283***	PAD	Mataram	***100***	***553.950.369***
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	1	1.415.727	PAD	Mataram	1	1.342.191

2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lap	1	107.510.413	PAD	Mataram	1	101.926.072
2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lap	1	11.461.656	PAD	Mataram	1	10.866.311
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap	1	463.912.487	PAD	Mataram	1	439.815.795
2.08.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***406.908.496***	PAD	Mataram		***392.211.390***
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	21	252.423.527	PAD	Mataram	21	239.312.063
2.08.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	12	30.526.969	PAD	Mataram	14	28.941.327
2.08.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	123.958.000	PAD	Mataram	1	123.958.000
2.08.01	**Program penunjang urusan pemerintah daerah (UPTD-PPA)**	**%**	**100**	**615.500.000**	PAD	Mataram	**100**	**654.700.000**
2.08.01.1.06	***Administrasi umum Perangkat Daerah***	***Paket***	***1***	***22.500.000***	PAD	Mataram	***1***	***24.200.000***
2.08.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Paket	1	4.000.000	PAD	Mataram	1	4.500.000
2.08.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1	12.000.000	PAD	Mataram	1	12.500.000
2.08.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Paket	1	5.000.000	PAD	Mataram	1	5.500.000
2.08.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Paket	1	1.500.000	PAD	Mataram	1	1.700.000
2.08.01.1.07	***Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah***	***Paket***	***0***	***193.000.000***	PAD	Mataram	***1***	***23.500.000***
2.08.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapanga	Unit	1	185.000.000	PAD	Mataram	1	21.000.000

2.08.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	1	8.000.000	PAD	Mataram	1	2.500.000
2.08.01.1.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainny	Unit	0	-	PAD	Mataram	0	-
2.08.01.1.08	***Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah***	***Paket***	***9***	***315.000.000***	PAD	Mataram	***9***	***317.000.000***
2.08.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sda dan listri	Paket	1	25.000.000	PAD	Mataram	1	26.000.000
2.08.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Paket	1	290.000.000	PAD	Mataram	1	291.000.000
2.08.01.1.09	***Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	***Paket***	***0***	***85.000.000***	PAD	Mataram	***5***	***93.000.000***
2.08.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Unit	5	25.000.000	PAD	Mataram	5	5.000.000
2.08.01.09.05	Pemeliharaan mebel	Unit	0	-	PAD	Mataram	4	3.000.000
2.08.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1	60.000.000	PAD	Mataram	2	65.000.000
2.08.02	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**%**	**5**	**410.000.000**	PAD	**Kab/Kota Se-NTB**	**7**	**460.000.000**
2.08.02.1.01	***Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi***	***OPD***	***46***	***60.000.000***	PAD	Kab/Kota Se-NTB	***46***	***65.000.000***
2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	60.000.000	PAD	Kab/Kota Se-NTB	1	65.000.000
2.08.02.1.02	***Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi***			-	PAD	Kab/Kota Se-NTB		-

2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Org			PAD	Kab/Kota Se-NTB		
2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				PAD	Kab/Kota Se-NTB		
2.08.02.1.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pember-dayaan Perempuan Kewenangan Provinsi***	***Lembg***	***18***	***350.000.000***	PAD	Kab/Kota Se-NTB	***24***	***395.000.000***
2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Lembg	18	200.000.000	PAD	Kab/Kota Se-NTB	24	220.000.000
2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Org	150	150.000.000	PAD	Kab/Kota Se-NTB	200	175.000.000
2.08.03	**Program perlindungan perempuan (Bidang PP)**	**Org**	**125**	**102.000.000**	PAD dan DAK-NF	Kab/Kota Se-NTB	**.145**	**100.000.000**
2.08.03.1.01	***Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota***	***Org***	***35***	***51.000.000***	PAD	Kab/Kota Se-NTB	***40***	***50.000.000***
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dok	1	51.000.000	PAD	Kab/Kota Se-NTB	1	50.000.000
2.08.03.1.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi***	***Org***	***30***	***51.000.000***	PAD	Kab/Kota Se-NTB	***35***	***50.000.000***
2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Org	60	51.000.000	PAD	Kab/Kota Se-NTB	70	50.000.000

2.08.03	**Program Perlindungan Perempuan (UPTD PPA)**	**%**	**100**	**250.000.000**	DAK-NF	Kab/Kota Se-NTB	**100**	**260.000.000**
2.08.03.1.02	***Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota***	***Org***	***70***	***250.000.000***	DAK-NF	Kab/Kota Se-NTB	***75***	***260.000.000***
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	Layanan	60	250.000.000	DAK-NF	Kab/Kota Se-NTB	70	260.000.000
2.08.04	**Program peningkatan kualitas keluarga**	**%**	**85**	**145.000.000**	PAD	Kab/Kota Se-NTB	**95**	**150.000.000**
2.08.04.1.01	***Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi***	***Org***	***250***	***145.000.000***	PAD	Kab/Kota Se-NTB	***300***	***150.000.000***
2.08.04.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kab/ Kota	PD	46	50.000.000	PAD	Kab/Kota Se-NTB	46	55.000.000
2.08.04.1.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Dok	1	45.000.000	PAD	Kab/Kota Se-NTB	1	45.000.000
2.08.04.1.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Laporan	1	50.000.000	PAD	Kab/Kota Se-NTB	1	50.000.000
2.08.05	**Program pengelolaan sistem data gender dan anak**	**%**	**95**	**28.250.150**	PAD	Kab/Kota Se-NTB	**96**	**29.427.153**
2.08.05.1.01	***Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi***	***Dok***	***1***	***28.250.150***	PAD	Kab/Kota Se-NTB	***1***	***29.427.153***
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dok	1	28.250.150	PAD	Kab/Kota Se-NTB	1	29.427.153

2.08.06	**Program pemenuhan hak anak (Bidang PHA)**	**Kab**	**10**	**500.000.000**	PAD	Kab/Kota Se-NTB	**10**	**520.000.000**
2.08.06.1.01	***Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi***	***lembg***	***250***	***500.000.000***	PAD	Kab/Kota Se-NTB	***250***	***520.000.000***
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Orgssi	250	250.000.000	PAD	Kab/Kota Se-NTB	250	260.000.000
2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dok	1	250.000.000	PAD	Kab/Kota Se-NTB	1	260.000.000
2.08.07	**Program perlindungan khusus anak (Bidang PKA)**	**%**	**50**	**680.000.000**	PAD dan DAK-NF	Kab/Kota Se-NTB	**75**	**700.000.000**
2.08.07.1.01	***Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Org***	***354***	***340.000.000***	AD	ab/Kota Se-NTB	***705***	***350.000.000***
2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dok	1	340.000.000	PAD	Kab/Kota Se-NTB	1	350.000.000
2.08.07.1.03	***Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota***	***Lembaga***	***250***	***340.000.000***	PAD	Kab/Kota Se-NTB	***250***	***350.000.000***
2.08.07.1.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi .	Dok	1	340.000.000	PAD	Kab/Kota Se-NTB	1	350.000.000
2.08.07	**Program perlindungan khusus anak (UPTD PPA)**	**%**	**100**	**300.000.000**	DAK-NF	Kab/Kota Se-NTB	**100**	**350.000.000**

2.08.07.1.02	***Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi***	***Org***	***85***	***300.000.000***	DAK-NF	Kab/Kota Se-NTB	***95***	***350.000.000***
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Layanan	80	300.000.000	DAK-NF	Kab/Kota Se-NTB	90	350.000.000
2.14.02	**Program Pengendalian Penduduk**	**%**	**100**	**206.734.388**	AD	Kab/Kota Se-NTB	**100**	**210.869.076**
2.14.02.1.01	***Pemaduan dan Sinkronisasi Kebi-jakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk***	***Dok***	***1***	***206.734.388***	PAD	Kab/Kota Se-NTB	***1***	***210.869.076***
2.14.02.1.01.07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas pengelola kelompok kegiatan di masyarakat	Dok	1	103.367.194	AD	Kab/Kota Se-NTB	1	105.434.538
2.14.02.1.01.09	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Dok	1	103.367.194	PAD	Kab/Kota Se-NTB	1	105.434.538
2.14.03	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**%**	**100**	**150.000.000**	PAD	ab/Kota Se-NTB	**100**	**150.000.000**
2.14.03.1.01	***Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB***	***Dok***	***1***	***150.000.000***	PAD	Kab/Kota Se-NTB	***1***	***150.000.000***
2.14.03.01.01	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Lap	1	150.000.000	PAD	Kab/Kota Se-NTB	1	150.000.000

2.14.04	**Program pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga sejahtera**	**%**	**100**	**150.000.000**	PAD	Kab/Kota Se-NTB	**100**	**150.000.000**
2.14.04.1.02	***Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Ke Masyarakatan Tingkat Daerah Prov dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kese-jahteraan Keluarga***	***Dok***	***1***	***150.000.000***	PAD	Kab/Kota Se-NTB	***1***	***150.000.000***
2.14.04.1.02.05	Fasilitasi Penge-mbangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab/Kota	10	150.000.000	PAD	Kab/Kota Se-NTB	10	150.000.000

Data Kinerja

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB merupakan perencanaan yang sistematis, terarah yang mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga dikatakan anggaran berbasis kinerja. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan titik awal (Entre Point) dalam mengatasi akar masalah, penyebab masalah dan masalah pokok, sehingga dengan sendirinya hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

B. Saran

1. Rencana Kerja DP3AP2KB Provinsi NTB tetap mengacu pada Rencana Strategi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB Provinsi NTB.
2. Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB Provinsi NTB merupakan hal yang harus diindahkan untuk pelaksanaannya.
3. Apabila Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB Provinsi NTB terdapat hambatan/kendala dalam pelaksanaannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya untuk tahun-tahun yang akan datang.